



RENCANA KERJA PERUBAHAN 2023 SEKRETARIAT DAERAH KAB.BULELENG



SEKRETARIAT DAERAH KAB.BULELENG

Jln. Pahlawan No.1 Singaraja

Email : bpksetda.bulelengkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan karunia-Nya maka Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng telah menyusun dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan rencana kerja perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ini disusun sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah pada tahun anggaran 2023 yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja.

Diharapkan dokumen rencana kerja perubahan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2023 sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam rangka mewujudkan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sehingga terwujud peningkatan pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik.

Singaraja, Agustus 2023

Sekretaris Daerah
Kabupaten Buleleng



Drs. Gede Suvasa, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP: 196707101992031014

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/437/HK/
2023 TENTANG PENETAPAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Triwulan II Tahun 2023	8
2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Pelaksanaan Renja Dan Penanggulangannya	10
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Program dan Kegiatan	23
3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023	25
BAB IV PENUTUP	38



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 100.3.3.2/437/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa asumsi-asumsi yang dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, sehingga Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang

g.e

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

mf. 2

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 5 September 2023

PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
4. Arsip.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu, paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang

untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Sekretariat Daerah menyusun rencana kerja perubahan tahun 2023.

Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai bagian integral perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng menyelaraskan Rencana Strategis dengan visi dan misi sebagai dasar penyusunan kerangka acuan kerja penyusunan rencana kerja perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2023.

Penyusunan rencana kerja perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 disamping sebagai wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng menyusun rencana kerja perubahan Tahun 2023 secara proporsional dan terukur, dengan menentukan jenjang tanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, hasil dan evaluasi hasil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
3. Pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1.1 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) p e r u b a h a n Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2009 Bali Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan rencana kerja perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan

penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2023.

Penyusunan rencana kerja perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng ini bertujuan:

1. Terwujudnya konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan dan penganggaran.
2. Tersedianya pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023.
3. Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian rencana kerja perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun Berkenaan

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II tahun 2023

2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Pelaksanaan Renja Dan Penanggulangannya

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1 Program dan Kegiatan

3.3 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023

Bab V. Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Triwulan II

Evaluasi rencana kerja tahun lalu didasarkan atas hasil pengukuran kinerja dalam suatu sasaran, yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Dalam rangka realisasi tugas Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab mutlak diperlukan peningkatan tertib administrasi dalam perencanaan, pengadaan barang dan jasa pemerintah baik yang dibiayai dari APBN / APBD dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka serta perlakuan adil dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran pencapaian tujuan yang diemban. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2023 yaitu Belanja Operasi Dan Belanja Modal sebesar Rp. 71.127.913.191 (Tujuh Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai Rp.22.752.819.791,- dan Belanja Barang Dan Jasa

Rp.39.432.642.692,- sedangkan Belanja Modal Rp. 8.942.450.708,-

Realisasi sampai triwulan II sebesar Rp. 23.529.582.796,- (Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) atau sekitar 33.08% terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp. Rp. 10.290.186.332,- atau sekitar 46.99%, belanja barang dan jasa sebesar Rp.11.796.506.744,- atau sekitar 29.28% serta Belanja Modal Rp. 1.442.889.720,- atau sekitar 16,13% yang dijabarkan melalui 3 program 20 kegiatan serta 51 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini terdiri dari 12 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 55.965.794.291,- sudah terealisasi sebesar Rp. 18.967.981.734,- atau sekitar 33,89% dan realisasi fisik sekitar 47,36%. Anggaran dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional kesekretariatan.

2. Program Tata Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.820.448.900,- dan sudah teralisasi sebesar Rp. 3.606.878.996,- atau sekitar 30,51% dan realisasi fisik sekitar 53,48%. Anggaran dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan, peringatan hari-hari besar nasional dan daerah, kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah, pelatihan tukang banten, upacara keagamaan dan penguatan kompetensi pemuda.

3. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Program ketiga ini terdiri dari 4 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.341.670.000,- dan sudah teralisasi sebesar Rp. 954.722.066,- atau sekitar 28,57% dan realisasi fisik sekitar 48,44%. Anggaran ini dialokasikan untuk Sinkronisasi pengelolaan BUMD, pengawasan ekonomi mikro, pemantauan kebijakan sumber daya dan pengelolaan barang jasa.

2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Capaian Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Penanggulangannya.

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Pada awal pelaksanaan kegiatan dikarenakan harus menunggu pengesahan anggaran, peraturan bupati mengenai pelaksanaan APBD maka sebagian program/kegiatan kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Untuk menanggulangnya maka harus dilakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.
2. Adanya pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan anggaran di bulan Mei tahun 2023 di mana ada penambahan anggaran untuk belanja modal.
3. Dengan adanya CSR dari pihak ketiga pada kegiatan HUT Kota dan hari-hari besar juga menyebabkan serapan anggaran kecil
4. Beberapa kegiatan yang direncanakan belum bisa

direalisasikan karena belum adanya kesepakatan antar desa terhadap batas wilayahnya

5. Serapan target anggaran tidak mencapai target 50% dikarenakan juga adanya efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa

Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, namun sampai dengan Tri Wulan II tahun 2023 terdapat beberapa kegiatan yang sudah terealisasi optimal sesuai target dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut adalah :

1. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai perencanaan yang disusun
2. Mengevaluasi anggaran yang sudah dibiayai oleh CSR pada Perubahan APBD atau melakukan pergeseran untuk kegiatan prioritas lainnya
3. Mendorong dan memfasilitasi percepatan kesepakatan antar desa terkait batas wilayah
4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang tertuang dalam DPA dan ketersediaan anggaran pada anggaran kas.

Berikut gambaran selengkapnya rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan Sekretariat Daerah triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan Sekretariat Daerah TriWulan II Tahun 2023

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA			CAPAIAN KINERJA (%)	
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	SATUAN	ANGGARAN /KEUANGAN	OUTCOME /OUTPUT
(1)		(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100	
	A. PROGRAM PENUNJANG								
01.0.00.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	55.965.794.291	100,00	18.967.981.734	47,36	%	33,89	47,36
01.2.01.	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA/DPA dan e-Sakip Daerah	1.229.348.000	100,00	383.712.951	57,89	%	31,21	57,89
01.2.01.01	(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	754.728.000	7	238.946.283	5	Dokumen	31,66	71,43
01.2.01.06.	(2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	474.620.000	12	144.766.668	6	Dokumen	30,50	50,00
01.2.11.	2. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan yang Sesuai Ketentuan yang Berlaku	852.522.000	100,00	312.500.000	25,00	%	36,66	25,00

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA			CAPAIAN KINERJA (%)	
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	SATUAN	ANGGARAN /KEUANGA N	OUTCOME /OUTPUT
(1)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100		
01.2.11.01.	(3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	102.522.000	12	-	-	Orang/Bulan	-	-
01.2.11.04.	(4) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	750.000.000	12	312.500.000	6	Orang/Bulan	41,67	50,00
01.2.02.	3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan	22.862.917.791	100,00	10.584.577.956	50,00	%	46,30	50,00
01.2.02.01.	(5) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21.900.297.791	12	10.290.186.332	6	Bulan	46,99	50,00
01.2.02.03.	(6) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	962.620.000	12	294.391.624	6	Dokumen	30,58	50,00
01.2.03	4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah	236.102.500	100,00	84.337.090	50,00	%	35,72	50,00
01.2.03.06	(7) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	236.102.500	12	84.337.090	6	Laporan	35,72	50,00
01.2.13.	5. Penataan Organisasi	Nilai PMPRB Pemkab	938.000.000	65,00	326.958.736	57,20	Nilai	34,86	88,00
01.2.13.01.	(8) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	305.408.611	2	113.859.652	1	Dokumen	37,28	50,00

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA			CAPAIAN KINERJA (%)	
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	SATUAN	ANGGARAN /KEUANGAN	OUTCOME /OUTPUT
(1)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100		
01.2.13.02.	(9) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	254.877.637	3	82.636.284	3	Laporan	32,42	100,00
01.2.13.03.	(10) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	377.713.752	20	130.462.800	18	Dokumen	34,54	90,00
01.2.05.	6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Sesuai Ketentuan yang Berlaku	35.000.000	100,00	10.700.000	42,47	%	30,57	42,47
01.2.05.03.	(11) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN lingkup Setda Kabupaten Buleleng yang Update	35.000.000	146	10.700.000	62	ASN	30,57	42,47
01.2.06.	7. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Sesuai Ketentuan Berlaku	3.780.947.684	100,00	638.674.497	58,76	%	16,89	58,76
01.2.06.01.	(12) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penerangan Lingkungan Kantor Memadai	248.458.571	49	34.633.500	21	Jenis	13,94	42,86
01.2.06.06.	(13) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	177.283.158	46.572	63.745.980	27.524	Eksemplar	35,96	59,10
01.2.06.08.	(14) Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	2.267.214.880	12	354.483.500	6	Bulan	15,64	50,00
01.2.06.09.	(15) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.087.991.075	865	185.811.517	359	Orang/Hari	17,08	41,50

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA			CAPAIAN KINERJA (%)	
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	SATUAN	ANGGARAN /KEUANGA N	OUTCOME /OUTPUT
(1)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100		
01.2.07.	8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perlengkapan di Lingkup Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan yang Memadai	8.517.746.700	100,00	1.442.889.720	42,37	%	16,94	42,37
01.2.07.05.	(16) Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	1.499.055.000	50	-	21	Buah	-	42,00
01.2.07.06.	(17) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.992.857.700	50	1.376.398.500	21	Unit	27,57	42,00
01.2.07.10.	(18) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	2.025.834.000	18	66.491.220	8	Unit	3,28	44,44
01.2.08.	9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Kerumah tanggaan Pimpinan Daerah	2.974.327.301	100,00	1.010.273.581	41,68	%	33,97	41,68
01.2.08.01.	(19) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Pelayanan Surat Menyurat	479.627.410	8.000	163.969.977	3.334	Eksemplar	34,19	41,68
01.2.08.02.	(20) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Telepon, Listrik dan TV Berlangganan	1.256.976.800	756	490.174.259	315	Rekening	39,00	41,67
01.2.08.03	(21) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1.237.723.091	21	356.129.345	9	Jenis belanja	28,77	42,86
01.2.09.	10. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Di Lingkup Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan yang memadai	5.145.941.065	100,00	1.374.959.995	42,97	%	26,72	42,97

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA			CAPAIAN KINERJA (%)	
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	SATUAN	ANGGARAN /KEUANGA N	OUTCOME /OUTPUT
(1)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100		
01.2.09.01.	(22) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.191.972.708	11	362.336.913	5	Unit	30,40	45,45
01.2.09.02.	(23) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.653.893.788	40	419.882.793	24	Unit	25,39	60,00
01.2.09.05.	(24) Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	55.750.000	350	9.335.100	144	Unit	16,74	41,14
01.2.09.06.	(25) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	661.685.620	17	149.462.556	9	Jenis	22,59	52,94
01.2.09.09.	(26) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.350.864.074	2	375.816.516	1	Lokasi	27,82	25,00
01.2.09.10.	(27) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	231.774.875	2.800	58.126.117	1.201	Buah	25,08	42,89
01.2.12.	11. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan Kerumah tanggaan Pimpinan Daerah	2.513.941.250	100,00	681.899.190	50,00	%	27,12	50,00
01.2.12.01.	(28) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1.372.941.250	12	370.598.802	6	Paket	26,99	50,00

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA			CAPAIAN KINERJA (%)	
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	SATUAN	ANGGARAN /KEUANGAN	OUTCOME /OUTPUT
(1)		(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100	
01.2.12.03.	(29) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Operasional dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.141.000.000	12	311.300.388	6	Bulan	27,28	50,00
01.2.14.	12. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase Pelayanan dan Akuntabilitas Publik	6.879.000.000	100,00	2.116.498.018	50,00	%	30,77	50,00
01.2.14.01.	(30) Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	2.610.000.000	12	903.185.220	6	Laporan	34,60	50,00
01.2.14.02.	(31) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.154.000.000	12	350.942.065	6	Laporan	30,41	50,00
01.2.14.03.	(32) Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3.115.000.000	12	862.370.733	6	Laporan	27,68	50,00
	B. PROGRAM UTAMA								
03.0.00	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE KOORDINASI KEGIATAN STRATEGIS	3.341.670.000	100,00	954.722.066	48,44	%	28,57	48,44
03.2.01.	13. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1.065.845.000	100,00	325.018.232	50,00	%	30,49	50,00

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA			CAPAIAN KINERJA (%)	
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	SATUAN	ANGGARAN /KEUANGA N	OUTCOME /OUTPUT
(1)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100		
03.2.01.01.	(33) Koordinasi,Sinkronisasi,Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	227.695.000	16	81.741.820	8,00	Dokumen	35,90	50,00
03.2.01.02.	(34) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	413.750.000	12	125.210.235	6	Laporan	30,26	50,00
		Jumlah Laporan Inflasi Daerah		12		6	Laporan		50,00
03.2.01.03.	(35) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	424.400.000	-	118.066.177	-	Dokumen	27,82	-
		Laporan TPAKD		4		2,00	Dokumen		50,00
03.2.02.	4. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pembangunan	736.100.000	100,00	125.599.700	50,00	%	17,06	50,00
03.2.02.02.	(36) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	736.100.000	12	125.599.700	6	Laporan	17,06	50,00
		Jumlah Laporan Kinerja		-		-	-		-
03.2.04.	15. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan,dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal,Tenaga Kerja	348.725.000	100,00	137.915.540	50,00	%	39,55	50,00

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA			CAPAIAN KINERJA (%)	
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	SATUAN	ANGGARAN /KEUANGAN	OUTCOME /OUTPUT
(1)		(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100	
03.2.04.01.	(37) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	348.725.000	12	137.915.540	6	Dokumen	39,55	50,00
		Jumlah Data Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Alam		1		0,50			Dokumen
03.2.03.	16. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase Capaian Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa, Prosentase Capaian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sesuai Dengan Standar Yang Telah Ditetapkan, Prosentase Capaian Pelaksanaan Pembinaan Pengadaan Barang Dan Jasa, Jumlah Pendampingan Atau Konsultasi Hukum Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Ditindak Lanjuti	1.191.000.000	100,00	366.188.594	43,75	%	30,75	43,75
03.2.03.01.	(38) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	466.500.000	5	164.485.802	2,50	Dokumen	35,26	50,00
03.2.03.02.	(39) Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	307.900.000	3	105.157.802	1,50	Dokumen	34,15	50,00
03.2.03.03.	(40) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	416.600.000	8	96.544.990	3,00	Orang	23,17	37,50

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA			CAPAIAN KINERJA (%)	
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	SATUAN	ANGGARAN /KEUANGA N	OUTCOME /OUTPUT
(1)		(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100	
02.0.00.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	CAPAIAN NILAI LPPD	11.820.448.900	100,00	3.606.878.996	53,48	Nilai	30,51	53,48
02.2.01.	17. Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Dengan Presentase Sesuai Standar Nasional	2.683.200.000	100,00	629.151.275	41,67	%	23,45	41,67
02.2.01.01.	(41) Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	959.875.000	2	253.302.345	1,00	Dokumen	26,39	50,00
02.2.01.02.	(42) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	736.575.000	2	110.766.430	1,00	Dokumen	15,04	50,00
02.2.01.03.	(43) Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	986.750.000	8	265.082.500	3,00	Dokumen	26,86	37,50
02.2.04.	18. Fasilitas Kerjasama Daerah	Jumlah Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Daerah	569.407.500	100,00	98.217.865	78,39	%	17,25	78,39
02.2.04.01.	(44) Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	395.157.500	30	90.407.865	24,00	Dokumen	22,88	80,00
02.2.04.03.	(45) Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	174.250.000	1	7.810.000	0,30	Laporan	4,48	30,00

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA			CAPAIAN KINERJA (%)	
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	SATUAN	ANGGARAN /KEUANGAN	OUTCOME /OUTPUT
(1)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100		
02.2.02.	19. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah di bidang keagamaan, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Upakara Daerah	6.526.241.400	100,00	2.343.521.556	51,00	%	35,91	51,00
02.2.02.01.	(46) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual yang meliputi Sarana /Prasarana Upacara dan dibidang Keagamaan Lainnya	5.232.916.400	100	1.899.309.606	55,00	Persen	36,30	55,00
02.2.02.02.	(47) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	865.887.500	100	325.403.535	48,00	Persen	37,58	48,00
02.2.02.03.	(48) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kemasyarakatan Lainnya	427.437.500	100	118.808.415	50,00	Persen	27,80	50,00
02.2.03.	20. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase produk hukum daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan	2.041.600.000	100,00	535.988.300	42,86	%	26,25	42,86
02.2.03.01.	(49) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	778.871.747	6	222.135.795	3,00	Dokumen	28,52	50,00

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA			CAPAIAN KINERJA (%)	
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	SATUAN	ANGGARAN /KEUANGAN	OUTCOME /OUTPUT
(1)		(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100	
02.2.03.02.	(50) Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	831.598.957	5	220.343.730	2,00	Kasus	26,50	40,00
02.2.03.03.	(51) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	431.129.296	3	93.508.775	1,00	Dokumen	21,69	33,33
JUMLAH TOTAL			71.127.913.191	100,00	23.529.582.796	49,76	-	33,08	49,76

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, yang penjabarannya secara rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan, dapat bersifat jangka panjang dan menengah antara 3-5 tahun atau bersifat tahunan saja. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 ini sudah mengalami perubahan mendahului di bulan Pebruari tahun 2023. Dari pagu anggaran induk sebesar Rp. 64.233.946.874,- bertambah sebesar Rp. 6.893.966.317,- menjadi sebesar Rp. 71.127.913.191,-. Penambahan ini untuk kegiatan belanja modal yang merupakan penambahan dana terarah yaitu Silpa DID dan Bagi Hasil Pajak. Untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng menyusun 2 program utama, 1 program penunjang, 20 kegiatan dan 51 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasional (Belanja Pegawai dan belanja barang jasa) sebesar Rp. 62.185.462.483

2. Belanja Modal sebesar Rp. 8.942.450.708

Dalam rancangan perubahan rencana kerja tahun 2023 program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan masih sama tidak mengalami pengurangan hanya anggarannya yang mengalami pengurangan. Secara garis besar rancangan pagu anggaran perubahan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasional (Belanja Pegawai dan belanja barang jasa) sebesar Rp. 59.252.395.849,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 8.581.987.260,-

Adapun rincian program kegiatan perubahan Sekretariat Daerah tahun 2023 yaitu

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini terdiri dari 12 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran induk sebesar Rp.55.965.794.291,- di perubahan menjadi sebesar Rp.53.342.811.069,- mengalami pengurangan sebesar Rp. 2.622.983.222,- atau sekitar 4,69%. Anggaran dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional kesekretariatan.

b. Program Tata Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan dengan pagu anggaran induk sebesar Rp. 11.820.448.900,-. Untuk anggaran perubahan sebesar Rp. 11.273.879.740,- ada pengurangan sekitar Rp. 546.569.160,- atau sekitar 4,62%. Anggaran dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan, peringatan hari-hari besar nasional dan daerah, kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah, pelatihan tukang banten, upacara keagamaan dan penguatan kompetensi pemuda.

3. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Program ketiga ini terdiri dari 4 kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan pagu anggaran induk sebesar Rp. 3.341.670.000,- dan pagu perubahan sebesar Rp.3.217.692.300,- ada pengurangan sebesar Rp. 123.977.700,- atau sekitar 3,71%. Anggaran ini dialokasikan untuk Sinkronisasi pengelolaan BUMD, pengawasan ekonomi mikro, pemantauan kebijakan sumber daya dan pengelolaan barang jasa.

3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023

Berikut adalah rumusan rencana program dan kegiatan perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

Tabel 3.1

Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2023			Pagu Indikatif (Rp.)					
				Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
4												
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4	01							71.127.913.191				
SEKRETARIAT DAERAH 67.834.383.109												
4	01	01					55.965.794.291	53,342,811,069				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja perangkat daerah									
4	01	01	2.01				1.229.348.000	1.219.087.328				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA/DPA dan e-Sakip									
4	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Buleleng,	100 %	7 dokumen	100 %	754.728.000	749.547.328
4	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Buleleng,	100 %	12 Laporan	100 %	474.620.000	469.540.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan					22.862.917.791	21.547.397.943
4	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Buleleng,	100 %	146 Orang/bulan	100 %	21.900.297.791	20.587.557.943
4	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Buleleng,	100 %	12 Dokumen	100 %	962.620.000	959.840.000
4	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah					236.102.500	227.342.500
4	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Buleleng,	100%	12 Laporan	100%	236.102.500	227.342.500
4	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian					35.000.000	35.042.000
4	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Buleleng,	100 %	12 Dokumen	100%	35.000.000	35,042,000
4	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum					3.722.709.980	3.491.503.086
4	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Buleleng,	100 %	49 Paket	100 %	190.220.867	239.238.573
4	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Buleleng,	100 %	46572 Eksemplar	100 %	177.283.158	179.011.158

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Buleleng,	100 %	12 Laporan	100 %	2.267.214.880	2.063.441.280
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Buleleng,	100 %	12 laporan	100 %	1.087.991.075	1.009.812.075
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	prosentase kualitas sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur					8.517.746.700	8.367.855.000
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Buleleng,	100 %	50 Buah	100 %	1.499.055.000	1.443.440.000
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Buleleng,	100 %	50 Unit	100 %	4.992.857.700	4.973.739.000
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Buleleng,	100 %	18 Unit	100 %	2.025.834.000	1.950.676.000
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2,974,327,301	2,864,606,001
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Buleleng,	100 %	12 Laporan	100 %	479.627.410	466.429.910
4	01	01	2.08	02'03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Buleleng,	100 %	12 laporan	100 %	1.256.976.800	1.210.173.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Buleleng,	100 %	69 laporan	100 %	1,237,723,091	1,188,003,091
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan BMD					5.145.941.065	4,889,851,789
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Buleleng,	100 %	11 Unit	100 %	1.191.972.708	1,141,750,708
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Buleleng,	100 %	32 Unit	100 %	1.653.893.788	1,538,033,788
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Buleleng,	100 %	350 Unit	100 %	55.750.000	53,682,000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Buleleng,	100 %	17 Jenis	100 Persen	661.685.620	637,135,620
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kab. Buleleng,	100 %	4 Lokasi	100 Persen	1.350.864.074	1,296,074,798

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Buleleng,	100 %	2751 Buah	100 Persen	231.774.875	223,174,875
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase kelancaran administrasi keuangan dan penunjang operasional KDH dan WKDH					852.522.000	784,242,672
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Buleleng,	100 %	1 Orang/Bulan	100 %	102.522.000	34,242,672
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Buleleng,	100 %	2 Orang/Bulan	100 %	750.000.000	750.000.000
4	01	01	2.12		Fasitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2.513.941.250	2,447,268,650
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Buleleng,	100 %	12 Paket	100 %	1.372.941.250	1,372,941,250
4	01	01	2.13	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Operasional dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Buleleng,	100 %	12 Paket	100 %	1.141.000.000	1,074,327,400
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Nilai PMPRB Pemkab					938.000.000	903.195.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Buleleng,	100 %	2 Dokumen	29,75	305.408.611	294,078,611
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik	Kab. Buleleng,	100 %	3 Laporan	29,75	254.877.637	245,422,637
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Buleleng,	100 %	20 Dokumen	29,75	377.713.752	363,693,752
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase Pelayanan dan Akuntabilitas Publik					6.879.000.000	6,565,419,100
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Buleleng,	100 %	12 Laporan	100%	2.610.000.000	2,477,119,000
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Buleleng,	100 %	12 laporan	100%	1.154.000.000	1,101,186,600
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Buleleng,	100 %	12 laporan	100%	3.115.000.000	2,987,113,500
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Capaian nilai LPPD					11.820.448.900	11,273,879,740

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen sebagai bentuk pertanggungjawaba penyelenggaraan pemerintah Daerah					2.683.200.000	2,498,091,840
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Buleleng,	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	959.875.000	924,275,000
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Buleleng,	100 %	14 Dokumen	2 Dokumen	736.575.000	623,666,840
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Buleleng,	100 %	8 Dokumen	2 Dokumen	986.750.000	950,150,000
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Penyelenggaraan Sarana Prasarana Upacara Daerah					6.526.241.400	6,277,988,400
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Buleleng,	100 %	1 Dokumen	100%	5.232.916.400	5,007,275,400
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Buleleng,	100 %	1 Dokumen	100%	865.887.500	859,133,500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendali						
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmasdiantaranya : Disdikpora, Dinsos, Disbud dan Dinas PMD	Kab. Buleleng,	100 %	1 Dokumen	100%	427.437.500	411,579,500
4	01	02	2.03		Fasitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dengan Peraturan Perundang-undangan					2.041.600.000	1,965,852,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Buleleng,	100 %	6 Raperda	100%	778.871.747	749,971,800
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Buleleng,	100 %	5 Kasus	100%	831.598.957	800,745,900
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab. Buleleng,	100 %	110 dokumen	100%	431.129.296	415,134,300
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Daerah					569.407.500	531,947,500
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Buleleng,	100 %	30 Dokumen	30 Dokumen	395.157.500	364,197,500
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan kerjasama	Kab. Buleleng,	100 %	15 Laporan	30 Dokumen	174.250.000	167,750,000
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan					3.341.670.000	3,217,692,300
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					1.065.845.000	1,065,845,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Buleleng,	96,65 %	16 Dokumen	29 Dokumen	227.695.000	247,695,000
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Buleleng,	96,65 %	12 Laporan	29 Dokumen	413.750.000	393,750,000
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Buleleng,	96,65 %	1 Dokumen1	29 Dokumen	424.400.000	424,400,000
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Penataan Administrasi Pembangunan					736.100.000	636.100.000
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Buleleng,	100 %	12 Laporan	12 Laporan	736.100.000	636,100,000
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase Capaian Pengelolaan (LPSE, Pembinaan, Pendampingan) Pengadaan Barang Jasa					1.191.000.000	1,146,813,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	01	03	2,03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa permohonan PPK kontrak Persentase penetapan pemenang sesuai jumlah paket pengadaan diumumkan pada Persentase pengelolaan dokumen hasil tender	Kab. Buleleng,	100 %	5 Dokumen	100 %	466.500.000	498,813,000
4	01	03	2,03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Buleleng,	100 %	3 Dokumen	100 %	307.900.000	288,000,000
4	01	03	2,03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, meliputi SIRUP, SPSE, EKatalog, E-Monev, SIKAP	Kab. Buleleng,	100 %	8 Orang	100 %	416.600.000	360,000,000
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman					348.725.000	368.934.300

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Modal, Tenaga Kerja						
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah data pelaksanaan pengeJumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja mbangan sumber daya alam	Kab. Buleleng,	100 %	12 Laporan	12 laporan	348.725.000	368,934,300

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dalam rangka menunjang tercapainya target dan sasaran pembangunan yang dioperasikan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Buleleng. Rencana kerja perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu.

Dengan adanya rencana kerja perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan antar Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Semoga rencana kerja perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Singaraja, Agustus 2023

Sekretaris Daerah
Kabupaten Buleleng



